LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN

PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA PEJENGKOLAN SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Peneliti:

Isnaini Lilis Elviyanti, M.Si.

Ahmad Aftah

Titi Maemunah

Dwiyono Waluyo

UNIVERSITAS MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN

2025

LEMBAR PENGESAHAN

1	Judul Penelitian	:	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Pejengkolan sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan
2	Kegiatan	:	Pengabdian
3	Identitas Peneliti	:	Isnaini Lilis Elviyanti, M.Si. Ahmad Aftah Titi Maemunah Dwiyono Waluyo
4	NIDN/NIM	:	0622119302 TI09976 TI08754 TI08545
5	Program Studi	:	Teknik Infornatika
6	Universitas	:	UMNU Kebumen
7	Biaya Kegiatan	:	Rp 8.000.000,00
8	Sumber Biaya	:	PT/Mandiri
9	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	6 Bulan

Kebumen, 5 Juni 2025

Mengesahkan
Rektor UMNU Kebumen

Dr. Imam Satibi, M.Pd.I
NIDN. 2123027201

Ketua LPPM UMNU Kebumen

Risdianto Hermawan, M.Pd.
NIDN. 0615119502

ARDHI : Jurnal Pengabdian dalam Negri
Volume. 3, Nomor. 4 Agustus 2025
e-ISSN :3031-8246, p-ISSN :3031-8173, Hal 77-83
DOI: https://doi.org/10.61132/ardhi.v3i4.1411
Tersedia : https://journal.aripafi.or.id/index.php/ARDHI

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Pejengkolan sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan

Capacity Building of the Pejengkolan Village Government as an Effort Towards Sustainable Development

Isnaini Lilis Elviyanti [1*], Ahamad Aftah Syukron[2], Titi Maemunah[1], Dwiyono Waluyo[1]
[1]Fakultas Teknik , Teknik Sipil , Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen,
Jl. Kutoarjo No.Km.05, Wonoboyo, Jatisari, Kec. Kebumen,
Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54317 Indonesia
[2] Fakultas Teknik, Teknik Informatika , Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen,
Jl. Kutoarjo No.Km.05, Wonoboyo, Jatisari, Kec. Kebumen,
Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54317 Indonesia
**Penulis Korespondensi: isna.elviyanti@gmail.com*

Article History:
Naskah Masuk: 30 Juni 2025;
Revisi: 25 Juli 2025;
Diterima: 24 Agustus 2025;
Terbit: 26 Agustus 2025

Keywords*: BPD; LKD; Sustainable Development; Village Governance; Village Government Capacity.*

Abstract *Improving the capacity of village government is a strategic step in realizing sustainable development oriented towards community welfare. Pejengkolan Village, Padureso District, Kebumen Regency, as a developing village, faces challenges in planning, managing, and implementing participatory and sustainable development programs. These challenges include limited knowledge of village officials, a lack of understanding of village development regulations, and weak coordination between the village government and village institutions and the community. This research/activity aims to strengthen the capacity of village government officials by increasing knowledge, skills, and understanding of the role of village institutions, particularly the Village Consultative Body (BPD) and Village Community Institutions (LKD), in the development planning process. Capacity building for local government officials is considered a crucial step to ensure sustainable development at the village level. The method used is a participatory approach through training, focus group discussions, and technical assistance. This participatory approach not only improves technical skills but also strengthens collaborative values among stakeholders. The results of the activity demonstrated an increase in village officials' understanding of village development regulations, their ability to develop inclusive development plans, and the establishment of synergy between the village government, the Village Consultative Body (BPD), the Village Funds (LKD), and the community. Furthermore, this activity demonstrated a shift in mindset among village officials toward more transparent, accountable, and responsive governance to community needs. Good governance at the village level is a fundamental element to achieving long-term community welfare. This effort is expected to serve as a foundation for strengthening village governance, which is able to address the dynamic needs of the community and encourage sustainable village development.*

Abstrak

Peningkatan kapasitas pemerintah desa merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen, sebagai salah satu desa berkembang, menghadapi tantangan dalam perencanaan, pengelolaan, serta pelaksanaan program pembangunan yang partisipatif dan berkesinambungan. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan pengetahuan aparatur, kurangnya pemahaman mengenai regulasi pembangunan desa, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah desa dengan kelembagaan desa dan masyarakat. Penelitian/kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah desa melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman mengenai peran kelembagaan desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dalam proses perencanaan pembangunan. *Capacity building for local government officials is considered a crucial step to ensure sustainable*

development at the village level. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui pelatihan, diskusi kelompok terarah, serta pendampingan teknis. *This participatory approach not only improves technical skills but also strengthens collaborative values among stakeholders.* Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman perangkat desa terhadap regulasi pembangunan desa, kemampuan menyusun rencana pembangunan yang inklusif, serta terbangunnya sinergi antara pemerintah desa, BPD, LKD, dan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini memperlihatkan adanya perubahan pola pikir aparatur desa menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga. *Good governance at the village level is a fundamental element to achieve long-term community welfare.* Upaya ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat serta mendorong terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kata Kunci: BPD; Kapasitas Pemerintah Desa; LKD; Pembangunan Berkelanjutan; Tata Kelola Desa.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa harus dilaksanakan secara partisipatif dan melibatkan seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan (minoritas, difabel, perempuan, miskin) (Irawati et al, 2021). Hal ini bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan oleh desa benar-benar bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat didesa tersebut, termasuk warga masyarakat yang tergolong sebagai kelompok rentan. Upaya dalam perencanaan pembangunan desa diperlukan adanya peningkatan kapasitas pemerintah desa. Kapasitas Pemerintahan Desa merupakan kemampuan perangkat Desa untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan prinsip tatakelola yang baik dan mengutamakan partisipasi masyarakat. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dilakukan dengan tujuan agar perangkat desa dapat melakukan tugasnya dengan lebih baik dan menghasilkan pelayanan yang lebih baik pula kepada masyarakat desa (Samaun et al, 2022). Sedangkan peningkatan kapasitas masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa (Sabardila et al, 2020).

Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten yang turut melakukan peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang tertuang pada dokumen RPJMD Kabupaten Kebuman Tahun 2021-2026 Bahwa pembangunan lingkungan hidup secara eksplisit dimandatkan pada misi keempat yaitu “Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” (Aziz et al, 2022). Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis Kabupaten Kebumen menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi terdampak peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat dan berakibat timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pada sisi lain, Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah yang ditetapkan sebagai kawasan Geopark

Karangsambung-Karangbolong yang berpotensi untuk menjadi Geopark UNESCO karena Karst Heritage di Geopark Karangsambung-Karangbolong berskala dunia mengingat batuan karst di kawasan ini tergolong unik dan langka (Ansori et al, 2023). Secara fungsional, Geopark Nasional ini memiliki 3 (tiga) fungsi utama yaitu sebagai kawasan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan (Ansori et al, 2024). Terdapat 12 kecamatan dan dan setidaknya ada 117 Desa yang wilayahnya berada disepanjang pegunungan beririsan dengan kawasan Geopark ini.

Problemnya bahwa kebijakan pembangunan desa terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial nampaknya belum mencerminkan keberpihakan yang signifikan, salah satunya di Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen. Kondisi pemerintahan desa Pejengkolan Kecamatan Padureso Kebumen menunjukan bahwa kapasitas ekstraksi yang dimiliki pemerintahan desa masih kurang mampu memanfaatkan aset-aset publik desa yang ada di desa sesuai dengan kebutuhan pelayanan administrasi desa semata (Dwiningrum, 2011). Demikian juga halnya dengan kapasitas responsif, pemerintah desa masih perlu ditingkatkan agar lebih mampu merespon berbagai aspirasi masyarakat melalui perencanaan pembangunan guna memenuhi kebutuhan masyarakat desa (Arnstein, 1969; Dwipayana & Eko, 2003). Sedangkan kapasitas jaringan dan kerjasama masih terbatas dan belum terprogram dalam perencanaan yang berkelanjutan, sehingga tujuan pembangunan yang berkelanjutan masih memerlukan proses yang panjang (Friedmann, 1992; Chambers, 1995).

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memperkuat kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat dalam merencanakan pembangunan. Melalui pengabdian ini juga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan pembangunan desa yang lebih berkualitas, tepat sasaran, dan merespons kepentingan masyarakat desa. Dengan meningkatnya kapasitas perencanaan, pemerintahan desa dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi prioritas pembangunan, mengalokasikan sumber daya secara optimal, dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat desa dalam merencanakan pembangunan akan memungkinkan masyarakat desa untuk menjadi bagian yang lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab dalam pembangunan lokal (Fikri et al, 2020)

2. METODE

Metode pelaksanaan memperkuat kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat dalam merencanakan pembangunan dilakukan di Balai desa Pejengkolan, Padureso, Kebumen. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada bulan Februari 2025 serta diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari pemerintah desa, lembaga desa dan PKK desa Pejengkolan. Adapun tahapan kegiatan yaitu yang pertama yaitu melakukan koordinasi dengan kepala desa Pejengkolan dan pemerintah desa terkait penguatan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat. Tahap kedua yaitu melakukan sosialisasi melalui metode ceramah (Ismani, et al 2010) tentang kedudukan Badan permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam perencanaan pembangungan desa. Tahap ketiga yaitu sesi tanya jawab.

3. HASIL

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pengetahuan dan ketrampilan dalam menyusun kebijakan perencanaan dan penganggaran Desa yang responsif terhadap keberlanjutan lingkungan atau pembangunan yang berkelanjutan, telah dilakukan kegiatan sosialisasi yang melibatkan berbagai unsur di tingkat desa. Peserta yang hadir yaitu pemerintah Desa, lembaga desa dan PKK desa Pejengkolan dengan jumlah total 30 peserta. Adapun materi yang disampaikan yaitu kedudukan Badan permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam perencanaan pembangungan desa. Materi tersebut disampaikan oleh Bp. Yusuf Murtiono Selaku Dewan Presidium FORMASI Kebumen.

Peserta sosialisasi sangat berantusias dalam mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai. Adapun materi yang disampaikan yaitu kedudukan Badan permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam perencanaan pembangungan desa.

4. DISKUSI

Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa Pejengkolan merupakan langkah fundamental dalam memperkuat tata kelola desa yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa aparatur desa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi pembangunan desa serta mekanisme perencanaan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menekankan pentingnya kemandirian desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa terbukti mendorong perbaikan kualitas dokumen perencanaan pembangunan. Dengan perencanaan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat, program-

program pembangunan lebih terarah dan relevan dengan kondisi lokal. Hal ini menjadi indikator penting bagi tercapainya pembangunan desa yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pada kegiatan pengabdian ini materi yang disampaikan oleh Bp. Yusuf Adalah menjelaskan tentang dasar pengaturan kedudukan Badan permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam perencanaan pembangungan desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 dan perubahannya serta Peraturan Menteri Dalam Negeri. Kemudian, Beliau menjelaskan perubahan Undang-Undang Desa pada Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014, perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 56 dan Nomor 114 tahun 2014 serta perubahan Peraturan Pemerintah Desa Nomor 21 tahun 2020.

Kemudian, dijelaskan terkait kedudukan Badan permusyawaratan Desa (BPD) yaitu menggali, menampung, mengelola, menyalurkan aspirasi masyarakat; menyelenggarakan musyawarah Desa; Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD serta menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu LKD & LAD adalah Mitra Pemerintah Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan sehingga terwujud pelayanan prima dan berkeadilan.

Setelah sosialisasi selesai dilaksanakan, dilakukan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman dan ketrampilan yang diperoleh oleh peserta. Evaluasi ini membantu dalam mengevaluasi efektivitas program dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki untuk pelatihan yang akan datang. Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta dapat menjadi agen perubahan yang mampu mempromosikan pembangunan berkelanjutan di tingkat Desa. Pemerintah desa dan masyarakat perlu mampu berkolaborasi dengan pihak-pihak eksternal seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk mendukung implementasi program pembangunan. Sinergi dengan berbagai pihak tersebut akan memperluas akses terhadap sumber daya, pengetahuan, dan jaringan, sehingga memperkuat upaya pembangunan desa secara keseluruhan.

5. KESIMPULAN

Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa merupakan kemampuan perangkat Desa untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan prinsip tatakelola yang baik dan mengutamakan partisipasi masyarakat. Upaya peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa telah dilakukan oleh Pemetintah Desa Pejengkolan, Padureso, Kabupaten Kebumen. Peningkatan kapasitas telah diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari pemerintah Desa, lembaga desa dan PKK desa Pejengkolan. Adapun materi yang disampaikan yaitu kedudukan Badan permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam perencanaan pembangungan desa. Melalui peningkatan kapsitas ini diharapkan dapat menghasilkan perencanaan pembangunan desa yang lebih berkualitas, tepat sasaran, dan merespons kepentingan masyarakat desa.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana berkat dukungan dari berbagai pihak. Tim pengabdi menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen yang telah memberikan izin, fasilitas, dan dukungan penuh selama kegiatan berlangsung. Serta ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama (UMNU) Kebumen.

DAFTAR REFERENSI

Ansori, C., Warmada, I. W., Setiawan, N. I., & Yogaswara, H. (2023). Geospatial analysis of the distribution of the Megalithic to colonial cultural features at the Karangsambung-Karangbolong National Geopark, Kebumen, Indonesia and its surrounding area. *International Journal of Geoheritage and Parks, 11*(3), 407–432. https://doi.org/10.1016/j.ijgeop.2023.06.002

Ansori, C., Warmada, I. W., Setiawan, N. I., Jogaswara, H., & Fariji, M. A. (2024). The linkage of geological parameters to cultural diversity at Karangsambung-Karangbolong Geopark and surrounding area, Kebumen, Indonesia. *International Journal of Geoheritage and Parks*, *12*(1), 168–179. https://doi.org/10.1016/j.ijgeop.2024.02.002

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, *35*(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Aziz, K. A., Ghulam Manar, D., & Rina Martini, D. (2022). Tata kelola desa wisata berbasis komunitas di Desa Sendangdalem Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen. *Journal of Politic and Government Studies.*

Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who gives a hoot? Intercept surveys of litterers and disposers. *Environment and Behavior, 43*(3), 295–315. https://doi.org/10.1177/0013916509356884

Chambers, R. (1995). *Rural development: Putting the last first.* London: Longman.

Dwiningrum, S. A. (2011). *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dwipayana, A., & Eko, S. (2003). *Membangun good governance di desa.* Yogyakarta: IRE Press.

Fikri, D., Rumain, A. S., Tasari, E. A., Renhoat, A., Masrani, M., Roat, Z. A., et al. (2020). Penguatan partisipasi masyarakat melalui pembangunan. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 1*(2), 98–109. https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i2.6558

Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The politics of alternative development.* Cambridge, MA: Blackwell.

Hidayati, S. N. (2016). Pengaruh pendekatan keras dan lunak pemimpin organisasi terhadap kepuasan kerja dan potensi mogok kerja karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship, 5*(2), 57–66. https://doi.org/10.30588/jmp.v5i2.164

Irawati, H., Wicaksono, A. D., & Prayitno, G. (2021). Modal sosial dan partisipasi masyarakat dalam kaitan tingkat kemajuan desa. *GEOGRAPHY: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, 9*(1), 1–12.

Ismani, Sukanti, Widayati, A., Ary, W. E., & Isnani. (2010). *Laporan pengabdian kepada masyarakat: Peningkatan profesionalitas guru dalam menghasilkan karya pengembangan profesi guru melalui pelatihan penulisan karya ilmiah bagi guru akuntansi SMK program keahlian akuntansi Daerah Istimewa Yogyakarta.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Risdwiyanto, A., & Kurniyati, Y. (2015). Strategi pemasaran perguruan tinggi swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta berbasis rangsangan pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship, 5*(1), 1–23. https://doi.org/10.30588/jmp.v5i1.142

Sabardila, A., Setiawaty, R., Pendidikan, M., Indonesia, B., & Surakarta, U. M. (2020). Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Bugel Kecamatan Polokarto melalui program sosialisasi. *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian, 4*(2). https://doi.org/10.36841/integritas.v4i2.556

Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2022). Upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi, 1*(1), 18–33. https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.18

Rincian Biaya

No.	Item	Harga	Total Biaya
1	Bahan-bahan penelitian		
	ATK	Rp. 350.000	**Rp. 350.000**
	Pedoman wawancara	Rp. 650.000	**Rp. 650.000**
2	Pengumpulan Data		
	Transkip dan peralatan perekaman	Rp. 600.000	**Rp. 600.000**
	Transportasi operasinal	Rp. 1.000.000	**Rp. 1.000.000**
	Honor validasi instrument	Rp. 1.100.000	**Rp. 1.1000.000**
	Kenang-kenanagan	Rp. 600.000	**Rp. 600.000**
	Konsumsi	Rp. 1.300.000	**Rp. 1.300.000**
3	Analisis Data		
	Setup database	Rp. 700.000	**Rp. 700.000**
	Askes jurnal	Rp. 250.000	**Rp. 250.000**
0	Jilid	Rp. 1.200..000	**Rp. 1.200.000**
	Total		**Rp. 8.000.000**